

STUDY KONSTRUKSI KELEMBAGAAN NELAYAN TANGKAP (KASUS NELAYAN TANGKAP DI KECAMATAN PACIRAN)

Mahfudhoh¹

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jl. Raya Deandlesh KM. 72 Paciran-Lamongan. dan Mahasiswa Program doctoral IPB University
Email: mahfudhoh.78@gmail.com

ABSTRAK

Lebih dari 60 persen penduduk dikecamatan Paciran kabupaten Lamongan bergantung pada laut, dan menyandarkan mata pencaharian sebagai nelayan dan pengolah hasil laut, yang mampu menopang lebih dari 80 persen kebutuhan hidup dalam rumahtangganya. Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil laut menurunkan hasil tangkapan perunit dan kualitasnya. Lemahnya penegakan hukum (*Quasi open access*) dan membiarkan eksploitasi berlebih mengakibatkan kualitas bahanbaku menurun dan mengalami konstruktifitas yang tidak stabil atas pengolahan hasil laut tersebut. Tulisan ini menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pemanfaatan sumberdaya laut dikecamatan Paciran, 2. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya laut di kecamatan Paciran. Menggunakan analisis deskriptif, Analisis *Stakeholder* (AS) dan analisis *Willingness To Accept* (WTA). Riset ini menggunakan data primer dan data skunder melalui sampel *purposive sampling* untuk AS dan *Random Sampling* untuk WTA. Serta kualifikasi data kualitatif diproses dengan menggunakan *stakeholder grid*. Sumberdaya laut dan perikanan pantai utara Kecamatan Paciran selama ini telah dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan tangkap, pariwisata natural *beach*, yang semua aktivitas ini merupakan bagian dari peran dalam konsepsi pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kearifan sumberdaya kelautan yang berbahan baku hasil laut dan perikanan. Sementara pemasaran hasil tangkap masih mengikuti kelembagaan patron klien dan mengandalkan sektor kunjungan pariwisata lokal dan nasional. Teridentifikasi 13 *stakeholder* terkait pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan. Masyarakat kecamatan Paciran, Perinitas, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Pemerintah Kabupaten Lamongan yang harus terlibat langsung dalam tatakelola kelembagaan pengolahan hasil laut dengan fasilitasi dari akademisi. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengeluarkan kebijakan didalam memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya. Terkait proses konstruksi kelembagaan nelayan tangkap, maka proses partisipasi harus mampu melibatkan *stakeholder* pada proporsi yang tepat.

Kata kunci: Kontruksi Kelembagaan, Nelayan Tangkap, *Stakeholder*.

ABSTRACT

More than 60 percent of the population in Paciran sub-district, Lamongan district, depend on the sea, and rely on their livelihood as fishermen and seafood processors, which are able to support more than 80 percent of their household needs. High dependence on marine products reduces the catch per unit and its quality. Weak law enforcement (*quasi open access*) and allowing overexploitation have resulted in declining quality of raw materials and unstable construction of the seafood processing. This paper answers the questions: 1. How is the use of marine resources in the Paciran sub-district, 2. Who are the stakeholders involved in the management of marine resources in the Paciran sub-district. Using descriptive analysis, *Stakeholder Analysis* (AS) and *Willingness To Accept* (WTA) analysis. This research uses primary data and secondary data through *purposive sampling* for AS and *random sampling* for WTA. And qualitative data qualifications are processed using a *stakeholder grid*. Marine resources and fisheries on the north coast of Paciran Sub-district have been used for capture fisheries activities, natural beach tourism, all of which are part of the role in the conception of local economic growth based on the wisdom of marine resources made from marine and fishery products. Meanwhile, the marketing of the catch still follows the patron-client institutions and relies on the local and national tourism visits sector. Identified 13 stakeholders related to the use of marine and fishery resources. Paciran sub-district community, Perinitas, Indonesian Fishermen Association (HNSI), Lamongan Regency Government who must be directly involved in the governance of marine product processing institutions with facilitation from academics. Local governments have the opportunity to issue policies in utilizing marine resources in their territory. Regarding the institutional construction process for fishing fishermen, the participation process must be able to involve stakeholders in the right proportions.

Keywords: *Institutional Construction, Capture Fishermen, Stakeholders.*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan laut Indonesia yang terdiri sekitar 70 persen dari keseluruhan wilayah teritorial, merupakan salah satu sistem ekologi yang produktif, beragam dan kompleks serta menjadi andalan. Di wilayah ini terkandung berbagai kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan, misalnya : perikanan, pariwisata, hutan mangrove, terumbu karang, bahan tambang dan jasa perhubungan. Secara logika seharusnya Indonesia sangat mungkin untuk menjadi negara yang berkecukupan, minimal bagi penduduk yang hidupnya tergantung pada laut, jika mampu mengelolanya dengan benar. Namun fakta yang kita jumpai saat ini ternyata berbeda, bahwa masyarakat nelayan sebagian besar masih tergolong sebagai penduduk miskin. Degradasi sumberdaya laut pun terus terjadi, mulai dari tangkap berlebih (*overfishing*), reklamasi pantai hingga perusakan terumbu karang. Status sumberdaya laut dan perikanan sebagai milik Negara (*state property*), pengaturannya dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui berbagai peraturan perundangan. Namun luasnya wilayah perairan laut negara ini menjadikan hampir tidak mungkin untuk mengklaim/menegaskan hak negara atas seluruh sumber daya yang ada karena biaya transaksi yang diperlukan sangatlah besar, terutama biaya monitoring. Kondisi ini menjadikan sumberdaya laut kita bersifat setengah akses terbuka (*quasi open access*).

Sebagaimana ramalan Garret Hardin, yang dikenal dengan istilah *The Tragedy of Commons*, sumber daya yang bersifat *open access* dengan tidak adanya ketegasan hak pengelolaan akan mendorong banyak pihak untuk ikut serta memanfaatkan secara maksimal namun tidak satupun berinisiatif untuk menjaganya. Tidak adanya kepastian, juga mendorong semakin tingginya persaingan dan konflik yang pada gilirannya akan menyingkirkan nelayan-nelayan tradisional sebagai akibat eksternalitas teknologi. Dampak lebih lanjut adalah semakin tidak pedulinya nelayan setempat terhadap sumberdaya laut di wilayahnya.

Seperti umumnya masyarakat pesisir dipulau-pulau besar dan kecil di Indonesia, ketergantungan masyarakat pantai utara kabupaten Lamongan terhadap laut sangatlah

tinggi. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan sebesar lebih dari 70 persen (sumber Data Primer) dengan cara menangkap tradisional, semi modern dan modern yang merupakan cara turun-temurun. Degradasi sumberdaya laut sudah menjadi semakin tidak pasti, sementara modal (input) yang harus dikeluarkan terus meningkat. Hal ini merupakan masalah penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat nelayan dan pengolah hasil laut di kecamatan Paciran secara keseluruhan. Oleh karenanya perlu upaya mengelola sumberdaya laut ini dengan pengelolaan yang mengarah pada kondisi lestari. Kontruksi kelembagaan yang dalam aktivitasnya akan melibatkan berbagai pelaku usaha dan menggunakan berbagai alternatif sistem teknologi dan model pemasaran digital, tentunya memerlukan suatu kelembagaan dalam menunjang aktifitas dan bentuk support terhadap masyarakat. Teknologi pengolahan yang hanya mengandalkan batas alam (*reef flat*) base hasil laut tentu akan berpotensi menimbulkan konflik. Ditengah situasi ekonomi dan degradasi sumberdaya kelautan yang cenderung tidak menentu serta mengalami penurunan. Tulisan ini menjelaskan gambaran tentang: Bagaimana pemanfaatan sumberdaya perikanan dan laut, Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya laut, dan adakah aturan formal dan non formal terkait pengelolaan sumberdaya hasil laut masyarakat di kecamatan Paciran.

METODE

Lokasi penelitian riset ini dilakukan dilokasi kecamatan Paciran tepatnya di desa Paciran, Desa Kranji, kelurahan Blimbing. Tiga wilayah tersebut dipilih dengan pertimbangan tempat populasi terbesar para nelayan dan perkumpulan nelayan berada. Table 1. Rencana kegiatan penelitian dilakukan.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Riset

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pembuatan Proposal.	Februari – Maret 2022	Studi Pustaka
2.	Pengambilan dan Tabulasi data	April 2022	Pengumpulan data sekunder dan primer.
3.	Analisis data hasil penelitian dan Laporan	Mei – Juni 2022	Tiap tahapan draft dilakukan diskusi dan konsultasi bersama.

Adapun waktu pengambilan data primer dan skunder dilakukan selama 5 bulan yaitu Februari sampai dengan Juni 2022.

Dengan tahapan sebagaimana table 1 diatas disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Sedangkan tiga wilayah sampel ditunjukkan dengan Peta Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1. Merah Muda Lokasi Riset



Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling (analisis stakeholder) dan random sampling (WTA Analysis dan persepsi masyarakat) dengan penggalian data menggunakan panduan kuesioner. Sementara jumlah responden didekati dengan rumus Slovin (1960) sebagaimana diacu Nirmala (2004), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran sample/responden

e : Nilai kesalahan yang ditentukan (10%)

Penggalian data primer selain melalui penyebaran kuesioner, juga dilakukan melalui pendekatan PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*) dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*).

Metode Analisis Analisis Deskriptif

Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Pola pemanfaatan ruang dan sumberdaya sangat penting untuk memajukan suatu wilayah. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan pola pemanfaatan sumberdaya laut berdasarkan jenis aktivitas, interaksi diantara aktivitas-aktivitas serta pola pemasaran hasil tangkapan, dan jalur olah ke matarantai ekonomi lanjutan digambarkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Aspek , Variabel dan Sumber Data

No	Aspek	Variabel	Sumber data terpilih
1	Kondisi Umum Wilayah	Kondisi fisik, sosial kependudukan, perekonomian wilayah, ketersediaan sarana prasarana	Monografi kelurahan, Bappekab, pustaka.
2	Pemanfaatan Sumberdaya laut dan perikanan.	Jenis-jenis aktivitas, interaksi dan kelembagaan pemasarannya	Wawancara dan quesioner
3	Aturan hukum terkait pengol sumberdaya laut	Hukum formal dan non formal (norma masyarakat)	Pemkab, Biro Hukum Kab., DKP, wawancara masyarakat

Sedangkan kriteria dan aspek lainnya yang mengikuti dalam riset ini dicover oleh analisis badan pemangku (*Stakeholder*).

1. Analisis Stakeholder

Dalam mempermudah pemahaman analisis stakeholder memudahkan peneliti menentukan kriteria dilai yang diharapkan.

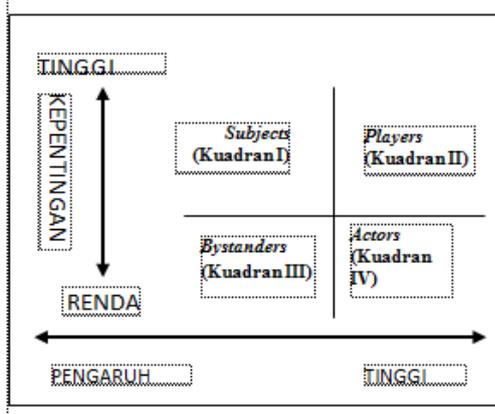
Tabel 3. Skor dan Nilai serta Kriteria dalam Analisis Stakeholder

Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
Kepentingan Stakeholder			
5	17-20	Sangat tinggi	Sangat bergantung pada keberadaan sumberdaya
4	13-16	Tinggi	Ketergantungan tinggi pada keberadaan sumberdaya
3	9-12	Cukup tinggi	Cukup bergantung pada keberadaan sumberdaya
2	5-8	Kurang tinggi	Ketergantungan pada keberadaan sumberdaya kecil
1	0-4	Rendah	Tidak tergantung pada keberadaan sumberdaya
Pengaruh Stakeholder			
5	17-20	Sangat tinggi	Jika responnya berpengaruh nyata terhadap aktivitas stakeholder lain
4	13-16	Tinggi	Jika responnya berpengaruh besar terhadap aktivitas stakeholder lain
3	9-12	Cukup tinggi	Jika responnya cukup berpengaruh terhadap aktivitas stakeholder lain
2	5-8	Kurang tinggi	Jika responnya berpengaruh kecil terhadap aktivitas stakeholder lain
1	0-4	Rendah	Jika responnya tidak berpengaruh terhadap aktivitas stakeholder lain

Sumber: Andrianto L., 2015

Analisis stakeholder adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan pemahaman pada suatu sistem melalui identifikasi aktor kunci atau stakeholder pada suatu sistem dan menduga peranannya pada sistem tersebut (Grimble dan Chan, 2011). Stakeholder didefinisikan sebagai semua yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan politik ataupun kegiatan pada suatu sistem, bisa sebagai individu, kelompok sosial, komunitas atau lembaga pada berbagai level dan tingkat social. Abbas, 2015 berpendapat bahwa ukuran kuantitatif dalam pemetaan stakeholder bisa digambarkan sebagai berikut: Sedangkan matrik stakeholder akan dianalisis sebagaimana Gambar 2. Dibawah untuk penunjang ekonomi masyarakat nelayan.

Gambar 2 . Matrik analisis stakeholder



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik, kimia dan mikrobiologi perairan pantai utara kabupaten Lamongan secara umum tergolong kurang baik. Parameter suhu, kecerahan, arus dan kekeruhan kurang memenuhi ambang batas waspada baku mutu. Parameter kecerahan yang berpengaruh bagi kehidupan biota laut yang berkorelasi dengan sedimentasi menunjukkan rata-rata di atas ambang batas (>3 m) menurut data primer yang dihasilkan dalam riset ini, terutama di pemukiman padat. Brondong, Blimbing Tingginya pembuangan limbah rumah tangga dan kapal (oli dan bahan bakar) saat berada di pelabuhan, pabrik-pabrik yang berdiri disepanjang pantai mulai ujung timur Pantai utara Kabupaten lamongan sampai ke kabupaten tetangga Tuban. Belum lagi reklamasi pantai dari perkantoran sampai wisata komersial, merupakan salah satu sebab menurunnya

kualitas fisik air laut di sekitar Pantai dua Kecamatan tersebut.

Gambar 3. Jumlah Penduduk di Dua Kecamatan



Sumber: BPS, 2019.

Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran adalah dua kecamatan yang berlokasi di pantai utara kabupaten Lamongan yang memiliki lebih dari 65 % penduduk bermatapencaharian sebagai Nelayan dan pengolah hasil laut. Kondisi sosial dan budaya masyarakat pada umumnya tercermin dari berbagai aktivitas bersama baik dalam wadah kelembagaan formal maupun non formal. Kelembagaan formal yang dibentuk oleh masyarakat umumnya terkait dengan aktivitas kesehariannya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rukun Nelayan, Himpunan Nelayan Payang, Himpunan Nelayan Sejahtera dan Organisasi nelayan lainnya. Sedangkan kelompok pengolah hasil Laut terdiri atas organisasi: POKLASAR PIN, POKLASAR Gampang Rukun dan Himpunan pengolah hasil laut lainnya.

Ada berbagai aktivitas yang menggerakkan perekonomian, kegiatan perikanan di dua kecamatan ini merupakan kegiatan ekonomi hulu yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi selanjutnya. Tinggi rendahnya hasil tangkapan akan sangat mempengaruhi tingkat transaksi aktivitas lainnya, seperti perdagangan, bahan baku industry maupun jasa transportasi.

Lebih dari 65 persen masyarakat di dua kecamatan ini mengeluti pekerjaan nelayan. Alat tangkap yang digunakanpun beragam, mulai dari tradisional maupun modern. Masing-masing alat akan memberikan hasil tangkapan yang berbeda, mulai dari ikan kecil hingga besar. Berdasarkan pengelompokan saat penjualan, hasil tangkapan nelayan dapat dibedakan dalam ikan konsumsi dijual mati, ikan konsumsi dijual hidup dan ikan yang olahan yang dijual di usaha kecil menengah olahan dan pabrik besar,

masing-masing memiliki pengumpul yang berbeda-beda. Data lapangan mencatat aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh sebagian ibu rumah tangga dengan membuat makanan olahan kecil dari bahan baku ikan dan *seafood* lebih dari 80 persen dilakukan ibu-ibu rumahtangga nelayan (Data Primer, 2022). Diduga dari berbagai aktivitas perdagangan diantara sesama masyarakat nelayan, merupakan potensi terjadinya pendistribusian pendapatan. Umumnya barang-barang kebutuhan primer dan biaya pendidikan anak dapat dicukupi melalui perdagangan hasil olahan sumberdaya kelautan. sedangkan barang-barang sekunder dan tersier hanya didapat oleh nelayan pemilik modal (Juragan) saja.

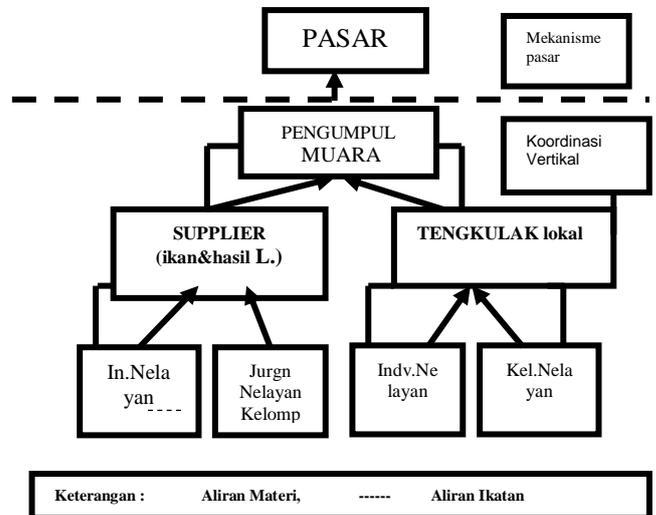
Interaksi Antar Aktivitas Hasil Nelayan

Terdapat setidaknya empat aktivitas pemanfaatan yang terrekam dalam riset ini, yaitu pengambilan sumberdaya laut yang terus menerus, *delivery* hasil laut kesektor Industri dan pengolah makanan, Pariwisata dan kuliner. Aktifitas tersebut pada ruang laut yang sama tentunya menimbulkan berbagai kemungkinan dampak, bisa berupa konflik maupun kerjasama. Interaksi dalam bentuk konflik paling banyak terjadi pada perikanan tangkap.

Konflik pada perikanan tangkap bisanya terjadi baik diantara sesama nelayan tangkap dengan alat yang berbeda atau dengan aktivitas utama lainnya, seperti konservasi dan wisata. Hal ini wajar terjadi karena sifatnya yang relatif mobile sehingga berpotensi mendatangi aktivitas lainnya Secara lengkap penggambaran interaksi dalam pemanfaatan ruang laut di desa-desa tersebut.

Data lapangan menunjukkan jumlah besaran hingga 50 persen dari total nelayan menginginkan arahan dari aktifitas lain yang tidak menimbulkan konflik, semisal aktivitas yang relatif tidak menimbulkan banyak konflik seperti budidaya laut, sifatnya yang menetap (tidak mobile) relatif yang tidak bersinggungan dengan aktivitas lainnya. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme pasar yang kemudian tergambar dalam mekanisme interaksi nelayan dan pasar seperti pada Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Interaksi Pasar dan Nelayan Stakeholder Pemanfaat Sumber Daya Laut



Hasil identifikasi *stakeholder* terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan laut wilayah pantai utara kabupaten Lamongan ditemukan 13 stakeholder dengan berbagai perankondisi tersebut dijelaskan dalam tabel 4 dibawah.

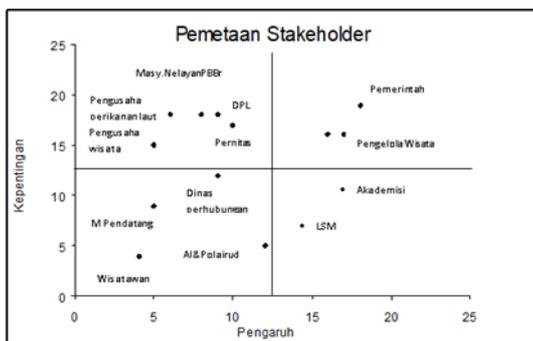
Tabel 4. susunan Stakeholder masyarakat Nelayan Pantura.

No	Stakeholder	Peranan/ Pemanfaatan
1	Masyarakat Paciran Pantura Lamongan (MPPL)	lokasi menangkap ikan dan lokasi sadar
2	Nelayan Luar Pulau PPL	lokasi menangkap ikan
3	Pengusaha perikanan laut	-lokasi usaha / mkn olahan laut
4	Pengusaha Wisata	-lokasi usaha wisata pantai
5	Rukun Nelayan	-lokasi tangkap konservasi (300m ²)
6	Kelompok nelayan	Kumpulan anggota nelayan berdasarkan alat tangkapnya (mancing, Kursin dan seterusnya).
7	Pemerintah (penyuluh/balai pelatihan)	penentu kebijakan (pengelolaan sumber daya) dan fasilitasi masyarakat
8	Pengelola Dermaga sandar	penentu kebijakan (Fasilitas Nelayan)
9	Dinas Perhubungan	penentu kebijakan (alur pelayaran)
10	AL&Polairud (keamanan)	-Pengamanan peraturan
11	Akademisi	lokasi penelitian dan fasilitasi stakeholder lain
12	LSM	- Fasilitasi masyarakat
13	Wisatawan	-Lokasi wisata/ rekreasi laut

Sumber: Data Primer, 2022

Secara garis besar dapat dikelompokkan didalam peran pemanfaatan dan peran pengaturan. Diantara dua peran ini terdapat peran fasilitasi (penghubung). Peran pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya baik dari dua kecamatan Paciran dan Brondong maupun dari luar serta oleh para pengusaha baik budidaya maupun wisata, sementara peran pengaturan dilakukan oleh pihak pemerintah dengan berbagai unsurnya. Sedangkan peran fasilitasi atau penghubung dilakukan oleh akademisi dan LSM (lebaga Swadaya Masyarakat) yang focus terhadap Nelayan dan pengolah hasil laut. Sedangkan pemetaan *stakeholder* sebagaimana tergambar dalam Gambar 5 sebagai berikut.

Gambar 5. Pemetaan Stakeholder



Terkait dengan proses konstruksi kelembagaan pengelolaan hasil laut di MPPL dan Brondong, keterlibatan *stakeholder* pada proporsi yang tepat sangatlah penting. Berdasarkan garis bantu diagonal dapat dipisahkan stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung (bagian atas) dengan *stakeholder* yang tidak harus terlibat secara langsung (bagian bawah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas bahwa kesimpulan yang mesti kita bisa paparkan adalah:

1. Sumberdaya laut dan perikanan pantai utara kabupaten Lamongan selama ini telah dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan tangkap, sedikit perikanan budidaya (tambak udang dll), wisata serta tempat kulinary berbasis pantai, yang semua aktivitas ini merupakan aktifitas penunjang ekonomi sektor kelautan. Dengan

model pemasaran hasil tangkap yang terhubung dengan industry modern (*delivery* pabrik dan pusat-pusat perbelanjaan, resto) ke kota-kota besar serta masih juga ada mengikuti kelembagaan bagi hasil (*patron-klien*).

2. Teridentifikasi 13 stakeholders terkait pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan. Stakeholders yang harus terlibat langsung didalam konstruksi kelembagaan pengolahan hasil laut dengan fasilitasi dari akademisi dan pemerintah setempat.

3. Kajian terhadap peraturan perundangan menunjukkan bahwa aturan hukum formal tentang pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan telah tersedia, sedangkan aturan non formal dari masyarakat tergolong tidak ada, diduga telah memudar. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengeluarkan kebijakan didalam memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya.

REKOMENDASI

Berpegang pada temuan dan simpulan maka riset ini perlu mencatat rekomendasi penting bagi peneliti, akademisi, masyarakat nelayan dan pemerintahan setempat antara lain adalah:

1. Membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui efektifitas kelembagaan yang sudah terbentuk aktif (*exis*) yang terfokus pada kelembagaan nelayan dan pengolah hasil laut itu sendiri sebagai bentuk dukungan (*support*) dan langkah maximisasi nilai tambah (*value edded*) masyarakat Nelayan.
2. Dalam mengelola sumberdaya perikanan dan laut diperlukan kerjasama yang berimbang antara keinginan pemerintah dan masyarakat serta kontinuitasnya bagi masadepan sumberdaya Laut dan Ikan di kawasan Pantura Lamongan.
3. Pentingnya untuk dapat melakukan *adjustment* (penyesuaian) secara terus-menerus hingga didapat wujud kelembagaan yang paling efektif bagi masyarakat Nelayan, kelangsungan ekowisata dan rumahtangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L. 2014. Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. PKSPL-IPB, Bogor.
- Adrianto, L. 2015. Konsep Kelembagaan Nelayan Kepulauan PKSPL-IPB, Bogor.
- Anwar, A. 1997. Analisis Ekonomi Biaya-Biaya Transaksi (Transaction Costs Economics Analysis). Makalah disampaikan dalam ceramah Umum mahasiswa Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Ps IPB. Bogor
- _____. 2001. Dasar-Dasar Teori Agency. Bahan Kuliah. Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wialayah dan Perdesaan. Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- _____. 2002. Suatu Arahan tentang Analisis Institusi Sistem Kontrak pertanian di Wilayah Pedesaan. Suatu etunjuk bagi Keperluan Penelitian Bisnis di Wilayah Pedesaan. Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan perdesaan, Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- _____. Teori Permainan (Game Theory) dan Aplikasinya dalam Analisis Ekonomi dan Kelembagaan. Bahan kuliah ekonomi organisasi Perdesaan Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Program Pasca Sarjana, IPB, Bogor.
- _____. 1993. Perlunya Memahami Kelembagaan Tradisional Lokal dalam Rangka Meningkatkan Kehidupan Nelayan. Makalah Seminar, Bogor.
- Bardach, J. E., J. H. Ryther & W.O. McLarney. 2002. Aquaculture , The Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organism. John Wiley & Sons Inc., New York, London , Sydney, Toronto.
- Christy, F. T. 2004. Hak Guna Wilayah dalam Perikanan Laut (Definisi dan Kondisi) Diterjemahkan oleh Mulyara Rasdani. Bagian Proyek Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang, Semarang.
- Dahuri, R. J, Rais. S, P, Ginting dan M, J, Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Effendi, I, W. Oktariza & Taryono. 2013. Penataan Kawasan Budidaya Laut (Penyusunan Rencana Budidaya Laut Pulau Semak Daun, Pulau Karang Congkak, Pulau Karang Bongkok dan Pulau karang Beras). Pemkab Kepulauan seribu- LPM, IPB, Bogor. 163 Hal.
- Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Gramedia, Jakarta.
- Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Síntesis dan Gagasan. Gramedia, Jakarta.
- Fallu, R. Abalone Farming. Fishing News Books, Oxford, London, Edinburg, Cambridge, Victoria.
- Field, B. C. 1994. Environmental Economics-An Introduction. McGraw-Hill, Inc, New York.
- Grimble, R, dan Chan, M.K. 1995. Stakeholder Analysis for natural Resources management in Developing Countries. Natural Resources forum, Great Britain.
- Hadi, S. 2005. Dampak Pembangunan terhadap Pengembangan Wilayah. Makalah pelatihan Amdal, kerjasama P4W-LPPM IPB dengan Kabupaten Bogor, Bogor.
- Harahap, A. B. S. 2005. Pembangunan Perekonomian Kepulauan Seribu Berbasis Sumberdaya Kelautan. Tesis Sekolah Pasca Sarjana, IPB, Bogor.

Jentoft, S. 2013. Institution in Fisheries : What they are, What they do, and How they change. Departement of Planning and Community Studies, Faculty of Social Sciene, University of Tromso, Norway

Kusnadi. 2010. Nelayan: Strategi Adaptasi dan jaringan Sosial. HUP, Bandung